



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 September 2024/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. AHMAD SULHAN SITOMPUL
2. Jabatan : CALON WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 492133

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.330.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/305 m2 di KAB / KOTA KOTA SIBOLGA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/217 m2 di KAB / KOTA KOTA SIBOLGA , LAINNYA Rp. 370.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/219 m2 di KAB / KOTA KOTA SIBOLGA , LAINNYA Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 352.5 m2/35.5 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, LAINNYA Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA SIBOLGA , WARISAN Rp. 950.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SIBOLGA , WARISAN Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 315.000.000

1. MOBIL, EXPANDER MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 82.267.479



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 3.727.267.479

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 3.727.267.479

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.